

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : ~~244~~ ²⁴⁵ / KPTS/II/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

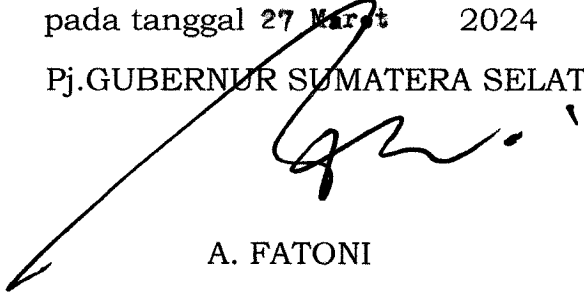
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 1 Februari 2024 Nomor PPH-UM.01.01-56 Hal Pembentukan Tim Sekretariat Indeks Reformasi Hukum di Kantor Wilayah;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Maret 2024

Pj.GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang